

PENGEMBANGAN SDM DIGITAL SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH: ANALISIS KUALITATIF PADA KABUPATEN BOJONEGORO

Abdulloh Umar¹, Ifa Khoiria Ningrum², M Ridlwan Hambali³, Lina Amiliya⁴
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri¹²³⁴
e-mail: umarabum007@gmail.com¹, nifakhoiria@unugiri.ac.id², ridlwan@unugiri.ac.id³,
linaamelia529@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang aktif mendorong inovasi pembangunan menghadapi tantangan dalam menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan SDM digital sebagai strategi pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta literatur relevan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan pengembangan SDM digital. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka teori pembangunan manusia dan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan literasi digital masyarakat, serta dukungan terhadap inovasi dan pelayanan publik berbasis teknologi. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi dan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan SDM digital memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kata Kunci: SDM Digital, Pembangunan Daerah, Kebijakan Publik, Kabupaten Bojonegoro

ABSTRACT

The development of digital human resources (HR) has become a strategic issue in regional development along with the acceleration of digital transformation in various sectors. Bojonegoro Regency, as one of the regions actively promoting development innovation, faces challenges in preparing HR that is adaptive to technological changes and the needs of sustainable development. This study aims to analyze the development of digital HR as a regional development strategy in Bojonegoro Regency using a qualitative approach based on literature studies. Data were obtained through analysis of policy documents, official government reports, scientific publications, and relevant literature related to regional development and digital HR development. Data analysis techniques were carried out descriptively and analytically by interpreting the data based on the theoretical framework of human development and digital transformation. The results show that the development of digital HR in Bojonegoro Regency is directed at increasing the capacity of the apparatus, strengthening the digital literacy of the community, and supporting technology-based innovation and public services. However, policy implementation still faces challenges in the form of competency gaps and institutional coordination. This study confirms that the development of digital HR plays a crucial role in strengthening the competitiveness and sustainability of regional development.

Keywords: Digital Human Resources, Regional Development, Public Policy, Bojonegoro Regency

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya membangun infrastruktur teknologi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi digital yang memadai (Judijanto, dkk, 2025). SDM digital menjadi elemen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang responsif, serta peningkatan daya saing daerah. (Adila dan Lolita Deby Mahendra Putri, 2024) Tanpa kesiapan SDM yang adaptif terhadap teknologi, upaya digitalisasi berpotensi tidak berjalan optimal dan bahkan menimbulkan kesenjangan baru dalam proses pembangunan daerah.

Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang tengah berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan serius dalam pengembangan SDM digital. (Sholikin, 2024) Isu keterbatasan literasi digital, ketimpangan kompetensi teknologi antar kelompok masyarakat, serta kesiapan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. (Sutopo, 2025) Di sisi lain, tuntutan terhadap pelayanan publik berbasis digital dan pengelolaan pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel semakin meningkat (Maisarah, dkk, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital tidak sekadar menjadi program pendukung, melainkan perlu diposisikan sebagai strategi utama dalam pembangunan daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital memiliki hubungan erat dengan keberhasilan transformasi digital di sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menegaskan bahwa kompetensi digital aparatur dan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan digital, inovasi pelayanan publik, serta peningkatan kinerja pemerintah daerah (Hidayatulloh, dkk, 2025). Studi lain juga mengungkapkan bahwa kegagalan transformasi digital di tingkat daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya kapasitas SDM, meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia. (Palis, 2025) Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa aspek SDM merupakan faktor kunci dalam strategi pembangunan daerah berbasis digital.

Secara konseptual, pengembangan SDM digital mencakup peningkatan literasi digital, penguasaan keterampilan teknologi, serta kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan (Manurung, dkk, 2026). Dalam perspektif pembangunan daerah, SDM digital dipandang sebagai modal manusia (*human capital*) yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ladiesya, dkk, 2025). Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah, pada umumnya menempatkan pengembangan kualitas SDM sebagai prioritas, termasuk dalam menghadapi tantangan era digital. Namun demikian, diperlukan kajian yang

lebih mendalam untuk memahami bagaimana pengembangan SDM digital dirumuskan dan diarahkan sebagai strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengembangan SDM digital sebagai strategi pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro, serta memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pembangunan daerah berbasis digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan analisis dokumen. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital diposisikan dan dirumuskan sebagai strategi pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman terhadap arah kebijakan, strategi, serta substansi pengembangan SDM digital sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan SDM di Kabupaten Bojonegoro. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis perangkat daerah (Renstra OPD), peraturan daerah, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan pengembangan SDM dan transformasi digital. Selain itu, sasaran penelitian juga mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pengembangan SDM digital dan pembangunan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen (Husnullail, dkk, 2024) kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang relevan, sedangkan studi literatur dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber pustaka (Verdianto dan Mohamad Muspawi, 2025) yang berkaitan dengan konsep SDM digital, transformasi digital, dan pembangunan daerah. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomarudin dan Halimah Sa'diyah, 2024). Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian berdasarkan kerangka teori dan konsep yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang

utuh mengenai pengembangan SDM digital sebagai strategi pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

PEMBAHASAN

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital dalam konteks pembangunan daerah merupakan respons strategis terhadap perubahan global yang ditandai oleh percepatan transformasi teknologi di berbagai sektor kehidupan. Hasil analisis terhadap dokumen kebijakan pembangunan Kabupaten Bojonegoro (Bappeda, 2025) menunjukkan bahwa isu penguatan kualitas SDM telah menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Digitalisasi dipahami tidak hanya sebagai pemanfaatan perangkat teknologi, tetapi juga sebagai perubahan cara kerja birokrasi, pola pelayanan publik, serta sistem pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, SDM digital ditempatkan sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan strategi pembangunan daerah berbasis digital. Posisi strategis ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, melainkan pada penguatan kapasitas manusia sebagai penggerak utama perubahan. Temuan ini menjadi titik awal untuk memahami bagaimana arah kebijakan daerah mengonstruksi peran SDM digital sebagai fondasi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sejalan dengan temuan tersebut, dokumen perencanaan daerah menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital diposisikan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern. Pemerintah daerah memandang bahwa transformasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa aparatur yang memiliki kompetensi digital yang memadai, baik dalam aspek teknis maupun manajerial. Hal ini tercermin dari penekanan kebijakan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, pengembangan SDM digital tidak berdiri sendiri sebagai program terpisah, tetapi terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Integrasi ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa transformasi digital merupakan proses struktural yang memerlukan kesiapan SDM secara menyeluruh.

Lebih lanjut, pengembangan SDM digital dalam kebijakan pembangunan daerah Bojonegoro diarahkan untuk menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin kompleks. Pelayanan berbasis digital membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu mengoperasikan sistem teknologi, tetapi juga memiliki pemahaman terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM digital dipandang sebagai penggerak utama dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi pelayanan tidak lagi dimaknai sebagai sekadar pengalihan layanan manual ke sistem daring, tetapi sebagai upaya

meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan SDM digital menjadi kunci dalam memastikan bahwa transformasi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Ilhadi, dkk, 2024).

Selain aparatur pemerintah, kebijakan pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro juga mencakup masyarakat sebagai subjek utama pembangunan daerah. Analisis dokumen kebijakan menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan literasi digital masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif. Literasi digital dipahami sebagai kemampuan dasar masyarakat untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. (Rany, dkk, 2025) Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital tidak hanya berorientasi pada kepentingan birokrasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi akibat digitalisasi. Dengan demikian, pengembangan SDM digital berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam proses pembangunan daerah (Anis A, dkk, 2025).

Penguatan literasi digital masyarakat memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki kompetensi digital diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pengembangan SDM digital berfungsi sebagai sarana untuk memperluas partisipasi publik dan mengurangi kesenjangan digital antar kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berbasis teknologi. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pembangunan (Samosir, 2025).

Dalam bidang ekonomi daerah, pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro dikaitkan dengan upaya peningkatan daya saing daerah. Dokumen kebijakan menunjukkan bahwa kompetensi digital dipandang sebagai modal penting untuk mendorong inovasi, produktivitas, dan efisiensi ekonomi, khususnya di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. SDM yang memiliki keterampilan digital diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan demikian, pengembangan SDM digital menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan potensi lokal melalui pemanfaatan teknologi (Handini, dkk, 2025).

Temuan tersebut menguatkan pandangan teori ekonomi berbasis pengetahuan yang menempatkan SDM sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, pengembangan SDM digital dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk menggeser orientasi pembangunan dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju penguatan modal

manusia. Strategi ini memiliki relevansi jangka panjang dalam menghadapi tantangan perubahan struktur ekonomi dan dinamika pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan SDM digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi daerah (Handini, dkk, 2025).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan SDM digital sebagai strategi pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di tingkat operasional. Dokumen perencanaan telah memuat arah dan tujuan pengembangan SDM digital, namun pelaksanaannya memerlukan sinergi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, serta konsistensi kebijakan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan SDM digital sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Temuan ini menjadi penghubung penting menuju pembahasan mengenai aspek kebijakan dan kelembagaan pada paragraf-paragraf berikutnya.

Dalam perspektif kebijakan publik, tantangan implementasi pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro mencerminkan pentingnya kapasitas institusional dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan dokumen perencanaan saja belum cukup menjamin keberhasilan strategi pengembangan SDM digital. Diperlukan kesiapan organisasi, kejelasan pembagian peran antarperangkat daerah, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh faktor sumber daya, komunikasi, dan komitmen pelaksana (Mansur, 2021). Dengan demikian, pengembangan SDM digital perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang kompleks, bukan sekadar agenda normatif dalam dokumen perencanaan.

Selain kapasitas institusional, konsistensi kebijakan juga menjadi faktor penting dalam pengembangan SDM digital sebagai strategi pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital menuntut kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan program tahunan. Tanpa konsistensi kebijakan, upaya penguatan SDM digital berpotensi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan daerah memegang peran strategis dalam memastikan bahwa pengembangan SDM digital tetap menjadi prioritas lintas periode pembangunan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa strategi pembangunan daerah berbasis digital memerlukan komitmen kebijakan yang kuat dan berjangka panjang (Handini, dkk, 2025).

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan orientasi jangka panjang yang relevan dengan tantangan global. Kebijakan pengembangan SDM digital dikaitkan dengan visi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan teknologi, dinamika ekonomi, dan tuntutan masyarakat. SDM digital dipandang sebagai

aset strategis untuk menghadapi perubahan struktur kerja, perkembangan ekonomi digital, serta transformasi sosial yang semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital bukan hanya respons jangka pendek, tetapi merupakan investasi pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan SDM digital tampak sangat dominan dalam keseluruhan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah bertindak sebagai perumus kebijakan, fasilitator program, sekaligus penggerak utama transformasi digital di tingkat lokal. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori peran negara dalam pembangunan yang menekankan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengembangkan modal manusia. Namun demikian, dominasi peran pemerintah daerah juga mengindikasikan perlunya penguatan kolaborasi dengan aktor lain agar pengembangan SDM digital tidak bersifat top-down semata.

Keterlibatan aktor non-pemerintah, khususnya lembaga pendidikan, menjadi aspek penting dalam pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro. Pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk membangun kompetensi digital secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah secara implisit menempatkan lembaga pendidikan sebagai mitra strategis dalam pengembangan SDM digital. Dalam konteks ini, pengembangan SDM digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan sinergi dengan sistem pendidikan formal dan nonformal untuk memastikan keberlanjutan penguatan kompetensi digital.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan memperkuat pandangan bahwa pengembangan SDM digital bersifat lintas sektor. SDM digital tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan daerah berbasis digital perlu memperhatikan kesinambungan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, pengembangan SDM digital dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Secara konseptual, temuan penelitian ini mengonfirmasi teori *human capital* yang menyatakan bahwa kualitas SDM merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Pengembangan SDM digital (Manurung, dkk, 2026) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa investasi pada kompetensi digital menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan daerah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan perlunya penguatan dimensi kebijakan dan kelembagaan dalam teori tersebut. Artinya, pengembangan SDM digital tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada sistem kebijakan dan tata kelola yang mendukung secara konsisten.

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro telah diposisikan sebagai strategi penting dalam pembangunan

daerah. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Temuan penelitian ini secara eksplisit menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa SDM digital merupakan elemen kunci dalam kebijakan pembangunan daerah berbasis digital.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami pengembangan SDM digital sebagai strategi pembangunan daerah. Temuan-temuan yang diperoleh tidak hanya mengonfirmasi teori-teori pembangunan dan kebijakan publik yang telah ada, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap pembangunan daerah berbasis digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital telah diposisikan sebagai strategi penting dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan pembangunan daerah menunjukkan adanya kesadaran bahwa transformasi digital tidak hanya menuntut penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga penguatan kapasitas SDM sebagai penggerak utama perubahan. SDM digital dipahami sebagai elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah di tengah dinamika perubahan global.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengembangan SDM digital di Kabupaten Bojonegoro mencakup berbagai dimensi, mulai dari peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, penguatan literasi digital masyarakat, hingga dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Strategi tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di tingkat operasional, yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, konsistensi kebijakan, serta sinergi lintas sektor.

Secara konseptual, temuan penelitian ini mengonfirmasi teori pembangunan manusia dan human capital yang menempatkan kualitas SDM sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital perlu dipahami dalam kerangka kebijakan dan kelembagaan daerah yang lebih luas. Dengan demikian, pengembangan SDM digital tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada sistem kebijakan yang mendukung dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan peneliti selanjutnya dalam merumuskan strategi pembangunan daerah berbasis digital yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adila dan Lolita Deby Mahendra Putri, N. (2024) “Digitalisasi Tata Kelola SDM Aparatur di Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4(2).

Anis A, dkk, D. (2025) “Analisis Tingkat Kesiapan dan Kapasitas Perencana Bappeda Provinsi Banten dalam Menghadapi Kompleksitas Tantangan Perencanaan Pembangunan Daerah,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 11(9).

Bappeda, B. (2025) “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Available at: <https://bappeda.bojonegorokab.go.id/menu/detail/2/RPJMDBOJONEGORO>.

Handini, dkk, N. (2025) “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2(5).

Hidayatulloh, dkk, M.A. (2025) “Efektivitas Inovasi dalam Peningkatan Kinerja Pegawai ASN: Studi Literatur pada Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2(3).

Husnullail, dkk, M. (2024) “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15(2).

Ilhadi, dkk, V. (2024) “Pendampingan Teknologi Informasi Berkelanjutan dalam Peningkatan Pengembangan Digitalisasi di Bidang Pelayanan Publik dan Kearsipan,” *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Vol. 8(1).

Judijanto, dkk, L. (2025) “Revolusi Digital dalam Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengoptimalkan Teknologi untuk Pengembangan Karyawan dan Produktivitas Organisasi,” *MEA: Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 9(3).

Ladiesya, dkk, B. (2025) “Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal: Studi Atas Kebijakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15(10).

Maisarah, dkk, P.A. (2025) “Peran Kritis Sistem Informasi Manajemen dalam Mewujudkan E-Government yang Responsif, Transparan, dan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, Vol. 6(3).

- Mansur, J. (2021) "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6(2).
- Manurung, dkk, M.P. (2026) "Strategi Pengembangan Human Capital untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi di Era Digital," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4(4).
- Palis, K. (2025) "Transformasi Digital dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi PAD di Indonesia," *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 5(1).
- Qomarudin dan Halimah Sa'diyah, Q. (2024) "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Vol. 1(2).
- Rany, dkk, R.M. (2025) "Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis di Era Teknologi Informasi," *Philosophiamundi; Journal of Global Humanistic Studies*, Vol. 3(4).
- Samosir, H.M. (2025) "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Binjai Melalui Penguatan Peran Kecamatan," *Jurnal Rambutan: Rencana Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 1(1).
- Sholikin, A. (2024) "Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro," *Journal of Society Bridge*, Vol. 2(3).
- Sutopo, D.S. (2025) "Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi dan Transformasi Sosial dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4(3).
- Verdianto dan Mohamad Muspawi, V. (2025) "Studi Literatur: Daftar Pustaka dalam Pembuatan Karya Ilmiah," *JKPS: Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 10(1).